

UPAYA PENANAMAN NILAI-NILAI DEMOKRATISASI DI SEKOLAH MELALUI PROJECT PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA

Ahmad Alfian Ramadhan
UIN Sunan Ampel
Surabaya
ahmadalfian233@gmail.com

Abstract: *Demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius, terutama akibat rendahnya budaya politik dan nalar kritis masyarakat, yang menempatkan negara ini dalam kategori "demokrasi cacat" (flawed democracy) menurut standar global. Masalah ini semakin berat karena kurangnya pendidikan politik yang mendalam bagi generasi muda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penanaman nilai demokrasi di sekolah melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan tema "Suara Demokrasi". Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) bersifat deskriptif-analitis. Peneliti menelaah dokumen aturan kurikulum, laporan indeks demokrasi terbaru, serta literatur ilmiah yang relevan. Data tersebut dianalisis untuk melihat hubungan antara penerapan kurikulum dengan peningkatan kompetensi kewarganegaraan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P5 efektif berfungsi sebagai "laboratorium demokrasi" nyata bagi siswa. Program ini mampu merekonstruksi pandangan siswa tentang demokrasi, dari yang semula hanya dimaknai sebatas prosedur pemilihan pemimpin (elektoral), menjadi sebuah etika sosial dan gaya hidup sehari-hari (way of life). Pembelajaran berbasis proyek ini terbukti secara signifikan meningkatkan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) dan watak kewarganegaraan (civic disposition), serta mampu mengurangi sikap apatis generasi muda terhadap dinamika politik. Kesimpulannya, implementasi P5 merupakan langkah strategis untuk memperbaiki kualitas demokrasi bangsa serta membentuk generasi penerus yang cerdas, kritis, dan dewasa dalam berdemokrasi, selaras dengan visi pendidikan nasional.*

Keywords: *Pendidikan Demokrasi, P5, Flawed Democracy, Suara demokrasi, keterampilan kewarganegaraan*

PENDAHULUAN

Pada UUD 1945 pasal 1 ayat 2 berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" dan Pancasila Sila ke-empat yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan negara Demokrasi.¹ Oleh karena itu sikap Demokrasi ini harus ada disetiap diri masyarakat Indonesia. Penanaman sikap demokrasi ini harus diterapkan dalam dunia pendidikan melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan disekolah agar kelak saat dewasa dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi negara dan dapat terhindar dari masalah-masalah demokrasi yang tidak diinginkan.

Demokrasi saat ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai sistem prosedural pemilihan pemimpin, melainkan sebagai nilai fundamental yang harus terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, realitas demokrasi global menunjukkan tantangan yang signifikan. Berdasarkan laporan demokrasi V-Dem 2021 menyebutkan adanya penurunan demokrasi global semakin cepat pada tahun 2020. Dunia saat ini lebih otoriter dibandingkan decade sebelumnya, sebanyak 68% populasi dunia kini tinggal di rezim otoriter (otokrasi tertutup atau electoral).² Adapun laporan *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam *Democracy Index 2024*, indeks demokrasi global mengalami

stagnasi bahkan kemunduran di beberapa wilayah. Rata-rata skor indeks demokrasi dunia berada pada angka 5.23 (skala 0-10).³ Yang menunjukkan bahwa sebagian besar populasi dunia hidup di bawah rezim yang belum sepenuhnya demokratis atau dalam kategori *flawed democracy* (demokrasi).

Standar demokrasi dunia saat ini tidak lagi hanya menitikberatkan pada elektoral semata, melainkan pada lima variabel utama: proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Penurunan skor global ini mengindikasikan adanya krisis dalam budaya politik dan kebebasan sipil yang perlu disikapi serius oleh berbagai negara. Fenomena ini mengindikasikan adanya krisis kepercayaan publik terhadap institusi politik dan perlunya penguatan budaya demokrasi sejak dini.

Dalam konteks nasional, kondisi demokrasi Indonesia juga mengalami dinamika yang fluktuatif. Mengacu pada data laporan *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam *Democracy Index 2024*, Indonesia berada pada peringkat 56 dari 167 negara dengan skor 6.53. Posisi ini menempatkan

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 3 (2001).

² Nazifa Alizada et al., *Autocratization Turns Viral* (V-Dem Institute, 2021), https://v-dem.net/static/website/files/dr/dr_2021.pdf.

³ Joan Hoey, *Democracy Index 2023: Age of Conflict* (EIU : Economist Intelligence Unit, 2024), <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024/>.



Indonesia dalam kategori *flawed democracy* atau "demokrasi cacat". Meskipun aspek proses pemilu dan pluralisme mendapatkan skor tinggi (7.92), aspek budaya politik Indonesia masih tergolong rendah dengan skor 4.38. Data ini diperkuat oleh *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)* tahun 2023 yang dirilis oleh Deputi Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri, di mana capaian IDI nasional berada pada angka 79.51

(kategori Sedang). Meskipun secara angka agregat terlihat baik, data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik mencatat adanya ketimpangan antar indikator, di mana aspek kebebasan sipil sering kali mengalami tekanan dibandingkan aspek lembaga demokrasi.⁴ Data kuantitatif ini menegaskan bahwa tantangan terbesar Indonesia bukan pada sistem prosedural, melainkan pada substansi budaya demokrasi dan nalar kritis warga negara yang masih perlu ditingkatkan.

Merespons data tersebut, pemerintah Indonesia menyadari bahwa perbaikan kualitas demokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui reformasi regulasi, tetapi harus dimulai dari intervensi pendidikan untuk memperbaiki skor budaya politik yang rendah. Sekolah sebagai laboratorium sosial memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas demokrasi ini dimanifestasikan melalui transformasi pendidikan nasional dengan peluncuran Kurikulum Merdeka.⁵ Kebijakan ini bertujuan untuk mengubah paradigma pendidikan yang sebelumnya berorientasi pada konten akademik semata, menjadi pendidikan yang holistik dan berkarakter. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan adalah instrumen utama dalam merawat demokrasi yang berkeadaban.

Sebagai implementasi konkret dari Kurikulum Merdeka, pemerintah menetapkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). P5 bukan sekadar program kokurikuler, melainkan upaya sistematis untuk menerjemahkan tujuan pendidikan nasional ke dalam format yang relevan dengan tantangan abad ke-21. Secara konseptual, P5 dirancang untuk menjawab tantangan degradasi moral dan lunturnya nilai-nilai kebangsaan. Di dalamnya, terdapat dimensi "Berkebinekaan Global" dan "Bergotong Royong" yang secara intrinsik memuat nilai-nilai demokratisasi, seperti penghargaan terhadap perbedaan, musyawarah, dan partisipasi aktif.⁶

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, integrasi nilai demokratisasi melalui P5 masih menemui berbagai hambatan, baik dari segi

⁴ Badan Pusat Statistik, *Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Pusat* (2025), <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2NCMy/-metode-baru--indikator-indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-pusat.html>.

⁵ "Keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek Nomor 009/H/KR/2022 Tentang Dimensi, Elemen, Dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka.," Sistem Informasi Kurikulum Nasional, February 15, 2022, https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduhan/Dimensi_PPP.pdf.

⁶ "Keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek Nomor 009/H/KR/2022 Tentang Dimensi, Elemen, Dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka."

pemahaman konsep secara lokal maupun adaptasinya terhadap standar kompetensi global. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana P5 dioperasionalkan sebagai sarana penanaman nilai demokratisasi di sekolah, guna mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kematangan dalam berdemokrasi sesuai dengan standar Profil Pelajar Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif. Fokus utamanya adalah mengkaji secara rinci berbagai literatur yang membahas tentang pendidikan demokrasi dan penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Data yang digunakan berasal dari sumber-sumber tertulis atau data sekunder, mulai dari dokumen aturan kurikulum, laporan indeks demokrasi, hingga artikel jurnal ilmiah terpercaya. Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti melakukan penelusuran digital di Google Scholar menggunakan kata kunci seperti 'Demokratisasi Sekolah' dan 'Profil Pelajar Pancasila' agar referensi yang didapat benar-benar relevan dan terkini.

Untuk mengolah data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Prosesnya dimulai dengan membaca seluruh referensi secara tuntas dan teliti, kemudian memilah informasi penting yang berkaitan dengan dimensi P5, khususnya 'Berkebinekaan Global' dan 'Bergotong Royong'. Peneliti mencari hubungan antara nilai-nilai dalam P5 tersebut dengan prinsip-prinsip demokrasi secara umum. Temuan-temuan dari berbagai sumber bacaan itu kemudian digabungkan dan dibandingkan untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya P5 berperan sebagai cara pemerintah dalam menanamkan demokrasi di sekolah. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan utama untuk menjawab tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Kondisi Demokrasi

1. Kondisi Demokrasi Internasional

Dinamika politik dunia saat ini menunjukkan bahwa demokrasi sedang menghadapi ujian berat. Demokrasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai prosedur memilih pemimpin, melainkan sebuah nilai mendasar yang harus hidup di tengah masyarakat.⁷ Namun, data empiris menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan *V-Dem Institute* tahun 2021, terjadi penurunan kualitas demokrasi global yang cukup

signifikan. Dunia saat ini dinilai lebih otoriter dibandingkan satu dekade sebelumnya, di mana tercatat sekitar 68% populasi dunia kini hidup di bawah rezim otoriter.⁸

Kondisi ini dipertegas oleh laporan *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam *Democracy Index 2024*, yang mencatat bahwa indeks demokrasi global mengalami stagnasi dengan rata-rata skor dunia hanya mencapai 5.23. Angka ini mengindikasikan bahwa

sebagian besar penduduk dunia hidup dalam sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya demokratis atau berada dalam kategori *flawed democracy* (demokrasi cacat).⁹ Penurunan ini bukan disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan pemilu, melainkan karena krisis pada aspek budaya politik dan kebebasan sipil. Standar demokrasi modern kini menuntut adanya partisipasi aktif warga

dan perlindungan hak sipil yang kuat, bukan sekadar rotasi kekuasaan. Fenomena global ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi yang perlu disikapi dengan serius oleh berbagai negara.

2. Kondisi Demokrasi Indonesia

Bercermin dari kondisi global, demokrasi di Indonesia juga mengalami fluktuasi yang cukup dinamis. Berdasarkan data *The Economist Intelligence Unit* (EIU) tahun 2024,¹² Indonesia berada pada peringkat ke-56 dari 167 negara dengan skor indeks 6.53. Posisi ini menempatkan Indonesia dalam kategori yang sama dengan tren global, yaitu *flawed democracy* atau demokrasi

⁷ Aurel Croissant and Jeffrey Haynes, *Democratic Regressions in Asia*, 1st ed. (London: Routledge, 2022), <https://doi.org/10.4324/9781003346395>.

⁸ Alizada et al., *Autocratization Turns Viral*.

⁹ Hoey, *Democracy Index 2023: Age of Conflict*.

cacat. Terdapat temuan menarik yang menjadi sorotan utama dalam data tersebut, yaitu adanya ketimpangan kualitas antar-indikator demokrasi. Indonesia dinilai sangat berhasil dalam menjalankan prosedur demokrasi, terbukti dengan skor proses pemilu dan pluralisme yang tinggi mencapai 7.92. Namun, keberhasilan prosedural ini berbanding terbalik dengan skor budaya politik yang masih sangat rendah, yakni di angka 4.38.

Data nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 juga memperkuat hal ini.¹³ Meskipun capaian indeks nasional berada di kategori "Sedang" dengan angka 79.51, masih terdapat ketimpangan di mana aspek kebebasan sipil sering kali mengalami tekanan dibandingkan aspek lembaga demokrasi lainnya. Fakta kuantitatif ini menegaskan bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan lagi pada sistem pemilihan umum, melainkan pada substansi budaya demokrasi dan nalar kritis warga negara yang masih perlu ditingkatkan. Rendahnya budaya politik inilah yang menjadi dasar mengapa intervensi melalui pendidikan karakter (seperti P5) menjadi sangat krusial.

Secara umum, diskursus akademik mutakhir menempatkan demokrasi Indonesia dalam fase yang mengkhawatirkan, sering disebut sebagai *democratic backsliding* atau kemunduran demokrasi. Indonesia, yang sebelumnya dipuji sebagai model demokrasi di Asia Tenggara, kini dinilai mengalami erosi kualitas institusi secara bertahap. Para ilmuwan politik, seperti Power dan Warburton dalam buku mereka "*Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression*", berargumen bahwa Indonesia telah bergerak

melewati fase stagnasi dan kini berada dalam tren regresi yang nyata. Penurunan ini tidak terjadi melalui kudeta militer yang mendadak, melainkan melalui proses *executive aggrandizement*, di mana pemimpin terpilih secara demokratis justru memperlemah norma-norma demokrasi dari dalam demi melanggengkan kekuasaan.

Salah satu indikator utama dari kemunduran ini adalah pelemahan sistem pengawas kekuasaan (*checks and balances*), terutama pada institusi penegak hukum dan lembaga legislatif. Mietzner dalam tulisannya di jurnal *Democratization* menyoroti fenomena "inovasi otoriter", di mana pemerintah menggunakan instrumen hukum untuk membatasi oposisi dan mempersempit ruang kompetisi elektoral. Contoh paling nyata adalah revisi UU KPK yang dinilai menumpulkan taring pemberantasan korupsi, serta proses legislasi yang minim partisipasi publik seperti pada

pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Hal ini menegaskan bahwa meskipun prosedur demokrasi (seperti pemilu rutin) tetap berjalan, substansi demokrasi berupa akuntabilitas dan supremasi hukum semakin tergerus oleh kepentingan oligarki.

Selain itu, kemunduran demokrasi juga dirasakan dalam aspek kebebasan sipil atau *civil liberties*. Terjadi fenomena penyusutan ruang sipil (*shrinking civic space*), di mana kritik terhadap pemerintah sering kali dihadapi dengan kriminalisasi

menggunakan UU ITE atau intimidasi digital. Wijayanto dan Berenschot menyoroti munculnya otoritarianisme digital melalui penggunaan pasukan siber (*buzzers*) yang dimobilisasi untuk memanipulasi opini publik dan menyerang suara-suara kritis. Akibatnya, masyarakat menjadi enggan atau takut untuk menyuarakan pendapat (fenomena *self-censorship*), yang merupakan tanda bahaya bagi kesehatan sebuah negara demokrasi.¹⁰

B. Konsep Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Sebagai Upaya Peningkatan Demokrasi Indonesia

Kurikulum merdeka diperkenalkan pada tahun 2022 sebagai kurikulum baru yang dirancang dengan pendekatan lebih fleksibel dan berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi esensial peserta didik.¹¹ Kurikulum merdeka memiliki tujuan untuk menciptakan pelajar Pancasila melalui pembelajaran kokurikuler. Didalam kurikulum merdeka guru diberikan kebebasan untuk memilih perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka mengedepankan proyek agar penguatan profil pelajar Pancasila dapat tercapai yang dapat dikembangkan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 20 Tahun 2020 mengenai strategi pendidikan dan kebudayaan tahun 2020-2024.¹²

Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan langkah

¹⁰ Wijayanto et al., "The Infrastructure of Domestic Influence Operations: Cyber Troops and Public Opinion Manipulation Through Social Media in Indonesia," *The International Journal of Press/Politics*, November 11, 2024, 19401612241297832, <https://doi.org/10.1177/19401612241297832>.

¹¹ Medina Medina and Reno Fernandes, "Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Tema Suara Demokrasi (Studi Kasus SMAN 7 Padang)," *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy* 2, no. 4 (2023): 378–90, <https://doi.org/10.24036/nara.v2i4.176>.

¹² Kokom Nurjanah and Halimatun Saadah, "Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dengan Tema Suara Demokrasi Di SMK Setia Karya," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sultan Agung IV* 5, no. 2 (2022): 27–33.

untuk menghidupkan kembali nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus meningkatkan pemahaman serta pengamalannya di seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Di lingkungan sekolah, penerapan P5 memberi pengaruh besar terhadap pembentukan sikap moderasi beragama pada peserta didik. Upaya ini menjadi pilar penting dalam menjaga harmoni dan kerukunan antarumat beragama, sekaligus menegaskan peran pendidikan sebagai garda terdepan dalam menumbuhkan moderasi beragama di kalangan siswa. Menurut KMA No. 347 Tahun 2022, Pelajar Pancasila adalah peserta didik yang memiliki cara berpikir, bersikap, dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila secara universal, serta menjunjung tinggi sikap toleransi demi menjaga persatuan bangsa dan perdamaian dunia. Profil Pelajar Pancasila disusun untuk membentuk generasi Indonesia yang kompeten, ber karakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai setiap sila Pancasila. Profil ini menggambarkan harapan sistem pendidikan terhadap peserta didik, baik dalam hal kemampuan menjadi warga negara yang demokratis maupun sebagai individu yang unggul dan produktif di era abad ke-21. Dengan demikian, peserta didik Indonesia diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta siap menghadapi berbagai tantangan masa kini dan mendatang.¹³

Secara mendasar, P5 hadir bukan sekadar sebagai program tambahan tanpa makna, melainkan sebagai sebuah jawaban strategis atas tantangan zaman. Program ini dirancang secara sistematis untuk mengatasi masalah degradasi moral dan mulai lunturnya nilai-nilai kebangsaan yang dirasakan belakangan ini, sekaligus menjawab tantangan kehidupan abad ke-21. Dalam pelaksanaannya, guru diberikan kebebasan atau otonomi yang luas untuk memilih perangkat ajar yang paling sesuai dengan kebutuhan dan minat murid-muridnya. Hal ini didasarkan pada aturan pemerintah dalam Permendikbud No. 20 Tahun 2020, yang menekankan bahwa pengembangan karakter harus dilakukan melalui proyek yang relevan dengan tema-tema yang sudah diatur oleh negara.¹⁴

Salah satu aspek penting dalam implementasi profil pelajar Pancasila adalah upaya menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam lingkungan pendidikan. Demokrasi dalam konteks pembelajaran bukan sekedar pemilihan ketua kelas atau musyawarah organisasi siswa, tetapi mencakup partisipasi aktif siswa dalam proses belajar, penghargaan terhadap keberagaman pendapat, penguatan nilai-nilai

¹³ Putri Azhari et al., "KONSEP PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5) (ANALISIS DAMPAKNYA TERHADAP SIKAP MODERASI BERAGAMA PESERTA DIDIK DI SEKOLAH)," *TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam* 7, no. 2 (July 2024): 307–24, <https://doi.org/10.52166/talim.v7i2.6702>.

¹⁴ "Permendikbud No. 20 Tahun 2020," Kemendikbud, October 13, 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163733/permendikbud-no-20-tahun-2020>.



keadilan, serta kemampuan berpikir kritis dan reflektif terhadap permasalahan sosial.¹⁵ Dengan demikian, pembelajaran demokratis menjadi jembatan bagi siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila tidak ditujukan untuk memenuhi capaian pembelajaran tertentu dan tidak terikat pada materi pelajaran tertentu. Proyek ini merupakan kolaborasi berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam satuan pendidikan. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila, proyek ini menggunakan sistem pembelajaran dengan mekanisme baru yang berbeda dari pembelajaran intrakurikuler. Fokus utamanya adalah mengembangkan dimensi-dimensi Profil Pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Dalam pelaksanaannya, peserta didik akan mempelajari dan mendalami tema-tema yang dipilih setiap tahun sesuai ketentuan P5.¹⁶

Berdasarkan keputusan BSKAP Kemendikbudristek, terdapat 6 dimensi utama yaitu Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; Berkebinekaan Global; Bergotong-royong; Mandiri; Bernalar Kritis; dan Kreatif.¹⁷ Dari dimensi tersebut muncul berbagai tema kegiatan P5 salah satunya yaitu "Suara Demokrasi". Secara spesifik, tema "Suara Demokrasi" dipilih sebagai wadah kontekstual bagi peserta didik untuk memahami mekanisme demokrasi tidak hanya sebagai prosedur politik, melainkan sebagai budaya dan etika sosial. Konsep ini berakar pada upaya menumbuhkan dimensi Profil Pelajar Pancasila, khususnya dimensi berkebinekaan global dan bernalar kritis. Melalui tema ini, sekolah bertindak sebagai laboratorium demokrasi skala mikro, di mana siswa diajak untuk menyelami isu-isu sosial, menyuarakan pendapat secara argumentatif, serta mempraktikkan pengambilan keputusan kolektif yang inklusif.²⁴ Pendekatan ini menggeser paradigma pendidikan kewarganegaraan dari sekadar hafalan teori menuju *experiential learning* (pembelajaran berbasis pengalaman).

Implementasi tema "Suara Demokrasi" menekankan pada pengembangan *civic disposition* (watak kewarganegaraan) dan *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan) yang esensial bagi pemilih pemula. Dalam praktiknya, siswa tidak hanya belajar tentang tata cara pemilihan umum (seperti pemilihan ketua OSIS), tetapi juga

¹⁵ Intan Irawati, *IMPLEMENTASI P5P2RA TEMA SUARA DEMOKRASI SEBAGAI*, 5 (2024): 32–48

¹⁶ Mochamat Alwi, Wingkolatin Wingkolatin, and Marwiah Marwiah, "Kreatifitas Guru dalam Merancang Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Tema Kewirausahaan Sebagai Upaya Menanamkan Jiwa Entrepreneur Peserta Didik di SMP Negeri 5 Samarinda," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi* 1, no. 2 (January 2024): 270–76.

¹⁷ "Keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek Nomor 009/H/KR/2022 Tentang Dimensi, Elemen, Dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka."

diajarkan untuk menghargai perbedaan pandangan, mengelola konflik, dan memahami konsekuensi dari pilihan yang diambil. Sebagaimana temuan Ulfah, proyek ini memberikan ruang kesempatan nyata bagi siswa untuk mempraktikkan budaya demokrasi secara kontekstual, sehingga partisipasi mereka tidak hanya berhenti pada bilik suara, tetapi meluas pada pemahaman etika berpolitik di lingkungan masyarakat. Melalui simulasi ini, siswa belajar bahwa esensi demokrasi terletak pada keterlibatan aktif dan tanggung jawab kolektif, bukan sekadar seremonial pergantian kekuasaan.

Tema suara demokrasi dalam P5 berfungsi sebagai instrumen untuk mereduksi apatisisme politik di kalangan generasi Z. Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam perencanaan hingga evaluasi kegiatan demokrasi di sekolah, tercipta rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dan agensi diri. Hal ini diperkuat oleh temuan Sabina dan Kabatiah, yang menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek pada tema ini secara signifikan mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa melalui simulasi demokrasi yang terstruktur, siswa tidak hanya belajar menjadi pengikut yang pasif, melainkan terlatih untuk menganalisis masalah, menyusun argumen, dan mengambil keputusan kolektif yang logis.²⁶ Oleh karena itu, keberhasilan tema ini tidak semata-mata diukur dari kemeriahan seremonial pemilihan, melainkan dari perubahan pola pikir siswa dalam menyikapi keragaman aspirasi yang menjadi fondasi utama masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi kepustakaan dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama demokrasi di Indonesia saat ini bukan terletak pada prosedur elektoral, melainkan pada rendahnya substansi budaya politik dan nalar kritis warga negara, yang menempatkan Indonesia dalam kategori *flawed democracy*. Oleh karena itu, intervensi melalui jalur pendidikan menjadi langkah yang strategis untuk memperbaiki kualitas demokrasi di masa depan.

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka hadir sebagai solusi nyata untuk menjawab tantangan tersebut. melalui tema "Suara Demokrasi" dalam P5 berfungsi efektif mengubah cara pandang siswa terhadap demokrasi; dari yang semula hanya dianggap sebagai prosedur pemilihan pemimpin, menjadi sebuah nilai dan etika yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah difungsikan sebagai "laboratorium kecil" di mana siswa dapat mempraktikkan demokrasi secara langsung melalui pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*).

Penerapan P5 ini memberikan dampak positif yang signifikan. Pertama,

program ini melatih siswa untuk berpikir kritis dan membangun watak kewarganegaraan yang baik, sehingga mereka mampu menghargai perbedaan pendapat dan mengambil keputusan secara logis. Kedua, kegiatan ini mampu mengurangi sikap acuh tak acuh (apatisme) politik pada generasi muda dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap bangsa. Dengan demikian, P5 merupakan langkah strategis untuk mencetak generasi penerus yang cerdas dan dewasa dalam berdemokrasi. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas demokrasi di Indonesia melalui optimalisasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

DAFTAR PUSTAKA

Alizada, Nazifa, Rowan Cole, Lisa Gastaldi, Sandra Grahm, Sebastian Hellmeier, Palina Kolvani, Jean Lachapelle, Anna Luhrmann, Seraphine F. Maerz, and Shreeya Pillai. *Autocratization Turns Viral*. V-Dem Institute, 2021. https://v-dem.net/static/website/files/dr/dr_2021.pdf.

Alwi, Mochamat, Wingkolatin Wingkolatin, and Marwiah Marwiah. "Kreatifitas Guru dalam Merancang Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Tema Kewirausahaan Sebagai Upaya Menanamkan Jiwa Entrepreneur Peserta Didik di SMP Negeri 5 Samarinda." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi* 1, no. 2 (January 2024): 270–76.

Azhari, Putri, Jeessica Shinta, Ahmad Daris, Annisa Nurfadillah, and Syahru Ramadhan. "KONSEP PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5) (ANALISIS DAMPAKNYA TERHADAP SIKAP MODERASI BERAGAMA PESERTA DIDIK DI SEKOLAH)." *TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam* 7, no. 2 (July 2024): 307–24. <https://doi.org/10.52166/talim.v7i2.6702>.

Badan Pusat Statistik. *Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Pusat*. 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2NCMy/-metode-baru-indikator-indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-pusat.html>.

Croissant, Aurel, and Jeffrey Haynes. *Democratic Regressions in Asia*. 1st ed. London: Routledge, 2022. <https://doi.org/10.4324/9781003346395>.

Darmawan, Wewen, and Alif Alfi Syahrin. "Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Tema Suara Demokrasi dalam Memperkuat

- Partisipasi Siswa melalui Pemilihan OSIS.” *Jurnal Global Futuristik* 2, no. 2 (August 2024): 105–14. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v2i2.569>.
- Hoey, Joan. *Democracy Index 2023: Age of Conflict*. EIU : Economist Intelligence Unit, 2024. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024/>.
- Irawati, Intan. *IMPLEMENTASI P5P2RA TEMA SUARA DEMOKRASI SEBAGAI*. 5 (2024): 32–48.
- “Keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek Nomor 009/H/KR/2022 Tentang Dimensi, Elemen, Dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka.” Sistem Informasi Kurikulum Nasional, February 15, 2022. https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduhan/Dimensi_PPP.pdf.
- Medina, Medina, and Reno Fernandes. “Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Tema Suara Demokrasi (Studi Kasus SMAN 7 Padang).” *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy* 2, no. 4 (2023): 378–90. <https://doi.org/10.24036/nara.v2i4.176>.
- Mietzner, Marcus. “Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism.” *Democratization* 27, no. 6 (August 2020): 1021–36. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>.
- Nurjanah, Kokom, and Halimatun Saadah. “Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dengan Tema Suara Demokrasi Di SMK Setia Karya.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sultan Agung IV* 5, no. 2 (2022): 27–33.
- “Permendikbud No. 20 Tahun 2020.” Kemendikbud, October 13, 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163733/permendikbud-no-20-tahun-2020>.
- Power, Thomas, Eve Warburton, and Institute of Southeast Asian Studies, eds. *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* Indonesia Update Series. Indonesia Update Conference, Singapore. Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute, 2020.
- Sabina, Sarah and Maryatun Kabatiah. “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROJECT CITIZEN DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA TEMA P5 SUARA DEMOKRASI DI SMP N 1 PERCUT SEI TUAN.” *Jurnal Pendidikan*

Kewarganegaraan 8, no. 2 (December 2024): 195–208.
<https://doi.org/10.31571/jpkn.v8i2.7924>.

Ulfah, Nafi'un, Listyaning Sumardiyani, Sukma Nur Ardini, and Maria Regina Dyah Pramesti. "IMPLEMENTASI PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5) DENGAN TEMA SUARA DEMOKRASI DI SMK NEGERI 6 SEMARANG." *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (August 2023): 455–62. <https://doi.org/10.55681/primer.v1i4.178>.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 3 (2001).

Wijayanto, Ward Berenschot, Yatun Sastramidjaja, and Kris Ruijgrok. "The Infrastructure of Domestic Influence Operations: Cyber Troops and Public Opinion Manipulation Through Social Media in Indonesia." *The International Journal of Press/Politics*, November 11, 2024, 19401612241297832. <https://doi.org/10.1177/19401612241297832>.